



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005 – 2025;

b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang NO.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8578)
13. Peraturan Pemerintahan nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Kampar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
6. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen dalam daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Pembangunan Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang JPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kamper.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD disusun berdasarkan azas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan;
2. Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
3. Azas umum penyelenggaraan negara.

Pasal 3

Ruang Lingkup RPJPD meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan yang bersifat makro pada semua fungsi Pemerintahan Daerah untuk waktu rencana 20 (dua puluh) tahun;
2. Visi, misi arah pembangunan daerah periode 2005-2025 yang disusun berdasarkan pertimbangan potensi daerah yang dimiliki dan masukan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Dokumen RPJPD dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas.

Pasal 5

RPJPD memiliki fungsi sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah, dan juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 6

Tahapan RPJPD meliputi :

1. Penyusunan Rencana;

2. Penetapan Rencana;
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
4. Evaluasi Rencana.

Pasal 7

(1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:

1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

(2) Penyusunan RPJPD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;
2. Penyiapan Rancangan Rencana Kerja;
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 8

(1) RPJPO Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI DAERAH

BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PENUiUP

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYELENGGARAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Bupati bertanggung jawab menyusun dokumen dan menyelenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

(2) Dalam menyelenggarakan RPJPD Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.

(3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan atau kondisi daerah setelah mendengarkan hasil musrenbang yang diadakan untuk itu

(2) Perubahan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi 5 (lima) tahunan atau terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 10 November 2007
BUPATI KAMPAR

Dto

BURHANNUDDIN HUSIN

Diundangkan di bangkinang

Pada tanggal 10 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dto

ZULHER

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Latar Belakang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota, dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah ditingkatkan Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pengertian RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. RPJP Daerah disusun berdasarkan potensi, permasalahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun.

3. Proses Penyusunan RPJP Daerah

Dalam upaya mengantisipasi arah pembangunan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, maka penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui tata cara proses sebagai berikut.

a. Penyiapan rancangan RPJP Daerah

Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

b. Penyelenggaraan Musrenbang.

Pembahasan rancangan awal (Visi, Misi, dan arah Pembangunan) dalam forum Musrenbang dengan para Stakeholders di bawah koordinasi Bappeda. Melalui penyelenggaraan Musrenbang, diharapkan diperoleh komitmen dari para stakeholders sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJP Daerah ;

c. Penyusunan Rancangan Akhir.

Hasil Kesepakatan Musrenbang sebagai bahan masukan utama untuk menyusun rancangan akhir, kemudian rancangan akhir Ini disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dan dipersiapkan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

d. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJP Daerah

Kepala Daerah menyampaikan rancangan akhir RPJP kepada DPRD Bersama dengan pihak eksekutif , DPRD mencermati, membahas dan menyempurnakan rancangan akhir RPJP melalui tahapan - tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan Dalam sidang paripurna DPRD, rancangan akhir RPJP yang telah disempurnakan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

B. Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kampar.

RPJP Daerah Kabupaten Kampar bertujuan (a). Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan antar pemerintah (pemerintah pusat dan provinsi Riau), dunia usaha dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan mencakup antara pelaksana dengan pelaku pembangunan. (b). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. (c). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah Kabupaten Kampar. (d). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di daerah Kabupaten Kampar. (e). Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di daerah ini.

C. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2005 - 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 11 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Kampar Tahun 2002-2006;

D. Hubungan RPJP Daerah dengan dokumen Perencanaan Lainnya.

RPJP Daerah Kabupaten Kampar merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, didalam penyusunannya mengacu kepada Renstra Daerah Kabupaten Kampar tahun 2001 -2006, dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kampar yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kampar untuk setiap jangka waktu 5 {lima} tahunan.

Keterkaitan antara RPJP Daerah Kabupaten Kampar dengan RTRW Kabupaten Kampar terutama terletak pada visi, misi dan tujuan pembangunan Jangka panjang, dimana RPJP bersifat makro sektoral dan RTRW mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pembangunan tersebut kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kampar berpedornan kepada RPJPD Kabupaten Kampar dengan mengacu pada RPJM Provinsi Riau dan Nasional. Rancangan awal RPJM Daerah Kabupaten Kampar yang disusun oleh Bappeda menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rancangan renstra SKPD, untuk selanjutnya rancangan renstra dimaksud disampaikan kepada Bappeda sebagai masukan utama dalam penyusunan Rancangan RPJMD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun oleh Bappeda sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, untuk selanjutnya rancangan rena di sampaikan kembali ke Bappeda sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD. Masing-masing SKPD dalam menyusun Renstra (lima tahunan) dari Renja (tahunan) di samping mengacu kepada RPJM dan RKPD Juga mempedomani Renstra dan Renja Provinsi Riau serta Renstra dan Renja Kementerian dan Lembaga.

E. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup RPJP Daerah Kabupaten Kampar mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar untuk jangka waktu Tahun 2005-2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : KONDISI, ANALISI, DAN PREDIKSI KONDISI DAERAH

- A. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup
- B. Demografi
- C. Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

- D. Sosial Budaya Dan Politik
- E. Prasarana Dan Sarana
- F. Pemerintahan

BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Pembangunan Daerah
 - 1. Strategi
 - 2. Peran Sub Wilayah Pembangunan
 - 3. Tahapan Dan Skala Prioritas

BAB IV : PENUTUP

BAB II
KONDISI, ANALISIS DAN
PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

A. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup

1. Kabupaten Kampar secara geografis terletak antara 01°00'40' Lintang Utara – 00°27'00' Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Dengan wilayah seluas 10.983,46 Km² , 11,62 % dari luas wilayah provinsi Riau (94.561,60 km²). Pada tahun 2005 Kabupaten Kampar terdiri dari 20 Kecamatan, 211 Desa dan 8 Kelurahan. Menurut kondisi geomorfologinya daratan Kabupaten Kampar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang bukit barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 0 - 500 meter dari permukaan laut.
2. Struktur tanah dan jenis tanah adalah arganosol, gleihumus, aluvial, hidroforfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis-jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus Tanah arganosol ini semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dikenal dengan tipe gambut ombrogen. Wilayah Kabupaten Kampar rentan terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang berlangsung selama ini secara berkala. Terdapat indikasi bahwasanya wilayah yang mengalami bencana banjir dan genangan menjadi semakin luas akibat luapan Sungai Kampar, Tercatat tinggi genangan berada pada kisaran 1 - 2,5 meter. Potensi terjadinya banjir dan genangan disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu, dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; keberadaan rawa gambut di wilayah hilir menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS.
3. Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Kampar. Pembukaan , hutan untuk fungsi lainnya yang beragam berlangsung secara berangsur-angsur. Alih fungsi lahan hutan antara lain dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri perikanan, permukiman, perladangan, dan perambahan hutan yang terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS , yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan upaya konservasi. Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir oleh berkurangnya daerah tangkapan air, juga menimbulkan kerusakan badan sungai secara fisik berupa longsor dan abrasi tebing dan tanggul sungai. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan oleh semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya luas lahan yang tidak diusahakan dan padang rumput.

4. keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Kabupaten Kampar. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama di dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari.
5. Kabupaten Kampar juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai. Kegiatan Industri yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit (PKS), crumb rubber, permukiman penduduk kegiatan komersial dan jasa dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai. Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik industri dan kegiatan lainnya yang berlokasi disepanjang sungai dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat. Sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK dan menggunakannya sebagai air baku penyediaan air bersih.
6. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II tanggal 6 Juni 1986 Luas Kawasan Hutan yaitu 496.275.31 Ha, baik Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) maupun Hutan Konservasi, dan kondisi terakhir berdasarkan hasil interpretasi Citra Landsat 7 + tahun 2006, luas lahan yang telah beralih fungsi mencapai 150.312,91 Ha menjadi kawasan budaya perkebunan dan pertanian maupun pemukiman masyarakat. Dengan demikian jumlah kawasan hutan yang ada hanya 345.962,40 Ha atau 30,44% dari luas wilayah kawasan Kabupaten Kampar sejak beberapa tahun terakhir dan berlangsung secara berkala adalah dampak kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Kabupaten Kampar, bahkan negara tetangga terdekat. Walaupun belum terdapat perhitungan yang pasti tentang kerugian akibat kebakaran hutan tersebut, namun dapat dipastikan akan mencakup jumlah yang sangat besar, dan bahkan telah mengganggu hubungan antar negara.
7. Geologi dan geomorfologi Kabupaten Kampar pada umumnya tersusun dari endapan gunung api yang berasal dari gunung api kuarter tua dan gunung api kuarter muda (peta geologi lembar Pekanbaru dan Sri Indrapura, Tanjung Finang). Proses pelapukan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, temperatur dan kelembaban udara. Jenis geologi yang ada sebagian besar adalah aluvium muda dan patahan (sesar) masih berjalan. Aluvium muda ini merupakan formasi geologi yang terbesar di Kabupaten Kampar dan penyebarannya hampir ada pada seluruh Kecamatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kampar bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan volkanis didaerah Sumatra Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Kabupaten Kampar umumnya datar, kecuali sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.
8. Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat

telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Kampar. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

9. Pengelolaan tata guna lahan dan tata air diupayakan melalui penyiapan rencana pengelolaan DAS terpadu; penataan permukiman di tepian sungai melalui konsep waterfront settlement; penataan lokasi industri, dan fasilitas umum; legalisasi dan RTRW Kabupaten; reboisasi dan penghijauan pengendalian kegiatan perladangan berpindah, perambahan hutan, dan illegal logging; pengendalian kebakaran hutan; prasarana penanggulangan banjir: pelaksanaan pengawasan kawasan perlindungan tata air; dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
10. Pengendalian pencemaran terhadap badan air diupayakan melalui penataan lokasi sumber-sumber pencemar; pengendalian pencemaran limbah B3; pelaksanaan program land application untuk industri kelapa sawit; pengendalian limbah domestik dan industri melalui pembangunan IPAL; dan membangun Sistem Informasi Lingkungan (SIL) untuk pengendalian pencemaran badan sungai.
11. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membangun lingkungan yang lestari diupayakan melalui penegakan hukum dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan; sosialisasi peraturan-perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup bagi industri; penanganan sengketa lingkungan di luar pengadilan; dan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL; pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ; pembentukan forum dan gerakan masyarakat peduli lingkungan; penilaian kinerja dan pemberian penghargaan, pelaksanaan program Adipraja, pengendalian dan penanganan limbah UKM dan rumah tangga, dan pengembangan program kemitraan dalam pemanfaatan dan daur ulang limbah.
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan dibidang pengelolaan lingkungan hidup diupayakan melalui penataan dan pengaturan peruntukan sungai; penetapan baku mutu kualitas lingkungan; penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan berfungsi lindung; pengembangan sarana laboratorium pengujian kualitas lingkungan; dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah; serta peningkatan perencanaan penataan ruang dan pembangunan daerah.
13. lingkungan hidup yang lestari telah menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh, termasuk yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kampar. Untuk itu, perlu diperkuat kesiapan Kabupaten Kampar dalam menghadapi perkembangan global di bidang lingkungan hidup yang antara lain terwujud sebagai trade barrier, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi

internasional yang telah diratifikasi, dan sebagainya. Di samping itu, sebagai daerah yang berdekatan dengan negara lain, juga dituntut kesiapan Kabupaten Kampar dalam pengendalian kerusakan lingkungan yang berpotensi mengganggu hubungan antar negara, seperti pengendalian kebakaran hutan. Pada skala Kabupaten Kampar juga dihadapkan pada tantangan untuk dapat mencapai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program nasional, seperti Bangun Praja, Proper, Sungai Lestari, dan sebagainya.

14. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kampar selain berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga memberikan tantangan bagi pemerintah Kabupaten untuk memiliki lingkungan hidup yang lestari. Dalam konteks tersebut, maka keberadaan instansi yang secara khusus membidangi lingkungan hidup; peran serta seluruh satuan kerja masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan; serta tersedianya prana dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Kampar.
15. Dalam jangka panjang, pembangunan dan perkuatan kelembagaan dan aparatur yang membidangi lingkungan hidup; pengembangan prana dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan standar dan tata cara yang berlaku secara global akan menempatkan Kabupaten Kampar sebagai pelestari dan penjaga kualitas lingkungan yang terkemuka di Provinsi Riau.

B. Demografi

1. Kondisi demografi Kabupaten Kampar pada saat ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk tahun 2000 adalah 449.506 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 231.570 jiwa dan perempuan sebanyak 217.936 jiwa dan pada tahun 2005 jumlah penduduk sebanyak 559.586 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 283.613 dan perempuan sebanyak 275.973 jiwa. Rerata laju pelabuhan penduduk periode 2000-2005 adalah sebesar 4,47% per tahun
 - b. Kepadatan penduduk tertinggi dicatat oleh Kecamatan Bangkinang,, 329 jiwa Km² , diikuti Kecamatan yang kedua padat adalah Kecamatan Kampar 289 jiwa Km² dan yang ke tiga adalah Kecamatan Bangkinang seberang 196 jiwa Km² sedangkan Kecamatan yang terendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu 13 jiwa Km².
 - c. Laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi walaupun pelaksanaan Keluarga Berencana relatif berhasil. Keberhasilan pelaksanaan KB ditunjukkan oleh program Keluarga Berencana semakin diadopsi oleh masyarakat serta berkembangnya pelayanan Posyandu di Pedesaan dan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun. Namun demikian yang perlu diwaspadai adalah arus migrasi sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan.
 - d. Struktur umur dan sex ratio berpengaruh terhadap perkembangan kependudukan pada masa yang akan datang. Proporsi penduduk berusia 0 - 14 tahun pada tahun 2005 adalah 34,77%, hal ini berpotensi pada masa mendatang menimbulkan masalah kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja.
 - e. Distribusi penduduk yang relatif tidak merata serta terkonsentrasinya, pada Ibukota Kecamatan dan dapat menimbulkan kendala bagi distribusi angkatan

kerja, pemerataan program pembangunan, dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial.

- f. Perusahaan Besar Swasta yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit dan karet cenderung mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah dan sering mengabaikan tenaga kerja tempatan. Kegiatan tersebut antara lain berlangsung melalui perkebunan pola Perkebunan Inti Rakyat, dimana bagian masyarakat setempat hanya 20% dan 80% untuk transmigran. Bagian 20% bagi masyarakat setempat tidak selalu terpenuhi dan akan kembali dimanfaatkan oleh transmigran. Kondisi tersebut telah membentuk beberapa kawasan perkebunan menjadi daerah dengan pemukim baru yang berasal dari luar Kabupaten Kampar.

2. Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja

- a. Angkatan kerja di Kabupaten Kampar pada tahun 2005 berjumlah 294.398 orang atau 52,61% dari jumlah penduduk, terdiri atas 65,08% angkatan kerja laki-laki dan 34,92% perempuan.
- b. Bagian terbesar penduduk bekerja pada kegiatan pertanian 67,22 % : pertambangan dan galian 0,45 %, Industri 4,38 %, listrik , Gas & Air 0,22 %, Konstruksi 5,74 %, Perdagangan 7,77 %, Angkutan dan Komunikasi 2,53 %, Keuangan 0,34 %, Jasa-jasa 11,35 %
- c. Berdasarkan data Susenas, pada tahun 2003 jumlah pencari kerja adalah 4,3 % dan tahun 2005 pencari kerja berjumlah 5,63 %. Jika keadaan ini dapat dipertahankan, tidak melewati ambang toleransi 10% sebagai patokan keberhasilan pembangunan.
- d. Kabupaten Kampar mempunyai daya tarik dengan dibangunnya perkebunan maka arus migrasi masuk memberikan implikasi terhadap kesempatan kerja yang semakin terbatas bagi penduduk setempat. Sejalan dengan otonomi daerah, maka peluang bekerja diprioritaskan bagi tenaga kerja tempatan dalam rangka meningkatkan peran serta penduduk setempat dalam pembangunan daerah. Pada jangka panjang salah satu kebijakan yang akan diambil adalah meningkatkan komposisi pemakaian tenaga kerja yang berasal dari masyarakat tempatan, minimal berbanding 70% dan 30% untuk tenaga dari luar, yang diikuti melalui program dan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia bagi angkatan kerja daerah.

3. Pendidikan

- a. Pendidikan penduduk yang berusia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki tahun 2003 adalah yang tidak punya ijazah 26,16 %, Sekolah dasar/MI 34,67 %, SLTP/MTs adalah 22,25 %, SMU/MA 11,99 %, Sekolah Menengah Kejuruan 2,53 %, Diploma I/II 0,60 % . Diploma III 0,64 % . Diploma IV/Universitas 1,16 %.
- b. Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin 96,34 %, Huruf lainnya 1,23% dan buta huruf 2,44 %
- c. Dengan diterapkannya Undang- undang wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kampar kondisi pendidikan tahun 2005 adalah sebagai berikut: tingkat pendidikan TK jumlah sekolah sebanyak 210 unit dan murid berjumlah sebanyak 7.666 orang dengan guru berjumlah 408 orang. Sedangkan SD berjumlah 453 unit dengan murid sebanyak 89.012 orang serta guru sebanyak 4.473 orang, kemudian SLTP berjumlah 79 dengan murid sebanyak 17.721 orang serta guru sebagai

pengasuh sebanyak 1.158 orang, Sekolah Menengah Umum 37 dengan murid 9.849 orang, tenaga guru sebanyak 589 orang, selain itu juga ada sekolah kejuruan sebanyak 5 unit, dengan murid sebanyak 1.727 orang diasuh tenaga guru sebanyak 145 orang.

- d. Pada tahun 2025, diperkirakan Angka Partisipasi Kasar (APK) , semua tingkatan (SD, SMP, dan SMA) mencapai 100%, artinya anak usia sekolah di Kabupaten Kampar akan tertampung pada semua jenjang pendidikan. Kemudian penduduk berusia diatas 10 tahun bebas buta huruf diharapkan pada jangka panjang seluruh tenaga pendidikan minimal tamatan Strata Satu (S1) dan bersertifikasi, dengan tamatan S2 sebesar 40%.
- e. Untuk jangka panjang meningkatkan ratio SMU dengan SMK 40 berbanding 60 untuk SMK dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai. Pengembangan sekolah Unggul semua tingkat pendidikan (SD, SMP dan SMA/K) bertaraf internasional yang islami minimal 1 (satu) sekolah untuk setiap Kecamatan.
- f. Sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik disemua tingkatan memenuhi standar minimal, serta pembangunan perpustakaan minimal 1 (satu) unit setiap Kecamatan.
- g. Mengembangkan dan meningkatkan Perguruan Tinggi, Play Group Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan TK/RA, di Kabupaten Kampar.

4. Kesehatan

- a. Mengacu pada indikator Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index, UNDP), maka kondisi kesehatan masyarakat sebagai salah satu komponen IPM di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan. Pada tahun 1999 IPM Kabupaten Kampar tercatat sebesar 65,3 tahun 2002 menjadi 67,8; dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 73,7.
- b. Komponen IPM tercatat sebesar 65,7 % angka harapan hidup dan angka melek huruf 95,7 % dan rata-rata lama sekolah 6,3 tahun pada tahun 1999. Sedangkan pada tahun 2002 Angka harapan hidup meningkat menjadi 66,0% dan angka melek huruf meningkat menjadi 97,8% serta rata lama sekolah 7,7 tahun. Selanjutnya pengeluaran perkapita pada tahun 1999 sebesar Rp.577.700 kemudian meningkat sebesar Rp.589.400 -Indikator kesehatan secara keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas, antara lain lama waktu sakit jumlah penduduk yang berobat, dan pertolongan persalinan oleh tenaga medis. Selain itu, tingkat kematian kasar (CDR) dan tingkat kematian bayi (IMR) juga menunjukkan penurunan.
- c. Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu), Poskesdes di setiap desa.
- d. Tersedianya Puskesmas di setiap Kecamatan.
- e. Tersedianya Puskesmas Rawat Inap di setiap daerah terisolir dan terpencil.

2. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan aspek demografi adalah

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi terutama dibentuk oleh migrasi masuk membutuhkan kesiapan dalam penyediaan lapangan pekerjaan alokasi ruang untuk keperluan bekerja dan domestik, serta penyediaan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial.

b. Pertumbuhan yang tinggi akan memberikan implikasi terhadap distribusi penduduk, dimana pada saat ini menunjukkan kecenderungan, terkonsentrasi pada Ibukota Kabupaten. Kesenjangan distribusi penduduk juga mengindikasikan kesenjangan perkembangan perekonomian dan menimbulkan tekanan kependudukan terhadap wilayah Kecamatan yang merupakan konsentrasi penduduk, Kesenjangan tersebut mengakibatkan polarisasi parsial dalam hal kemiskinan dan keterbatasan prasarana umum.

c. DAS merupakan kawasan yang relatif tertinggal oleh karena penduduk yang berdiam dalam DAS relatif terbatas hanya diwakili oleh beberapa konsentrasi permukiman.

d. Secara agregatif, Kabupaten Kampar menghadapi perubahan struktur kependudukan oleh keberhasilan program KB pada masa lalu, dimana piramida penduduk bagian tengah menunjukkan proporsi semakin besar, sehingga perlu disiapkan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh penduduk usia dewasa dan lanjut.

e. Pengaturan UMR di Kabupaten Kampar yang relatif tinggi tetap menjadi pendorong utama berlangsungnya migrasi masuk, selain potensi dan peluang ekonomi lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten ini.

f. Kecenderungan peningkatan pengangguran terdidik di kawasan perkotaan memberikan dampak terhadap upaya pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah, terutama dengan kawasan pedesaan yang relatif tertinggal di bidang sumber daya manusia terdidik.

g. Persaingan dalam pasar tenaga kerja, terutama pada lapangan usaha utama menyebabkan tenaga kerja tempatan senantiasa tertinggal oleh karena tidak mampu bersaing dalam hal kualitas sumber daya manusia dan kompetensi kerja.

h. Meningkatnya kesejahteraan dan angka harapan hidup masyarakat menuntut kesiapan penyediaan bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya.

3. keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Kampar ditunjukkan oleh :

- a. Peningkatan IPM dan komponen IPM, ditandai oleh penurunan angka kelahiran, angka kematian kasar dan meningkatnya angka harapan hidup.
- b. Penurunan angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Pada tahun 2004 angka kematian bayi tercatat sebesar 15 per 100.000 kelahiran dan angka kematian ibu melahirkan sebesar 4 per 100.000 kelahiran.
- c. Walaupun kebijakan transmigrasi belum mampu menyeimbangkan distribusi penduduk, namun beberapa kawasan telah tumbuh dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Dalam konteks tersebut dibutuhkan program Resettlemen penduduk lokal.
- d. Secara agregatif, Kabupaten Kampar menghadapi perubahan struktur kependudukan oleh keberhasilan program KB pada masa lalu, dimana piramida penduduk bagian tengah menunjukkan proporsi semakin besar, sehingga perlu disiapkan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh penduduk usia dewasa dan lanjut.

- e. Pengaturan UMR di Kabupaten Kampar yang relatif tinggi tetap menjadi pendorong utama berlangsungnya migrasi masuk, selain potensi dan peluang ekonomi lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten ini.
- f. Kecenderungan peningkatan pengangguran terdidik di kawasan perkotaan memberikan dampak terhadap upaya pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah, terutama dengan kawasan pedesaan yang relatif tertinggal di bidang sumber daya manusia terdidik.
- g. Persaingan dalam pasar tenaga kerja, terutama pada lapangan usaha utama menyebabkan tenaga kerja tempatan senantiasa tertinggal oleh karena tidak mampu bersaing dalam hal kualitas sumber daya manusia dan kompetensi kerja.
- h. Meningkatnya kesejahteraan dan angka harapan hidup masyarakat menuntut kesiapan penyediaan bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya.

3. Keberhasilan Pembangunan kependudukan di Kabupaten Kampar ditunjuk oleh :

- a. Peningkatan IPM dan komponen IPM. Ditandai oleh penurunan angka kelahiran, angka kematian kasar dan meningkatnya angka harapan hidup.
- b. .Penurunan angka kemamtian bayi dan ibu yang melahirkan. Pada tahun 2004 angka kematlan bayi tercatat sebesar 15 per 100.000 kelahiran dan angka kematian ibu melahirkan sebesar 4 pea 100.000 kelahiran.
- c. Walaupun kebijakan transmigrasi belum mampu menyeimbangkan dtribusi penduduk, namun beberapa kawasan telah tumbuh menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Dalam konteks tersebut dibutuhkan program Resettlemen penduduk lokal.
- d. Semakin menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup ditunjukkan oleh piramida penduduk yang proporsi bagian tengah menjadi semakin besar, sehingga dalam Jangka panjang bagian penduduk dewasa dan usia lanjut menjadi semakin besar.
- e. Kepadatan penduduk pada kawasan tertentu yang merupakan lokasi kosentrasi penduduk menjadi semakin besar seiring laju pertumbuhan penduduk dan migrasi masuk yang tinggi. sehingga rnenimbulkan tekanan kependudukan bagi kawasan yang bersangkutan.
- f. Dampak globalisasi dan otonomi daerah akan menciptakan heterogenitas yang semakin nyata, terutama oleh tingginya arus migrasi dan akselerasi proses urbanisasi.
- g. Peningkatan keberhasilan dalam penanganan permasalahan sosial melalui pemberdayaan, pelayanan, rehabilltasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- h. Sacara makro, bagian penduduk yang menamatkan pendidikan mulal bergeser dari setingkat SD ke jenjang yang lebih tinggl.
- i. Daya serap lapangan pekerjaan meningkat, walaupun secara proporsional belum mampu menampung pasar tenaga kerja yang diwakili oleh Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Kampar.
- j. Pendapatan per kapita telah mengalami peningkatan mengacu kepada PDRB per kapita maupun pendapatan regional per kapita.

k. Kontribusi sektor pertanian yang besar, dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB membutuhkan penyiapan lapangan kerja sektor-sektor lainnya, terutama di wilayah perdesaan.

7. Pembangunan Jangka Panjang diharapkan dapat :

a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara lebih proporsional hingga setara dengan laju pertumbuhan penduduk nasional, yakni sekitar 1,2% per tahun. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pengendalian dan pengaturan kependudukan.

b. Mengupayakan bagian penduduk berusia kurang dari 15 tahun tidak melampaui 23% dari jumlah penduduk. Dengan komposisi tersebut, maka bagian penduduk yang berusia dewasa dan lanjut mencapai sekitar 4,2% dari jumlah penduduk.

c. Nisbah ketergantungan (dependency ratio) kependudukan diharapkan mencapai 42,0, sehingga nilai-nilai produktif dapat berfungsi secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan.

d. Peningkatan kesejahteraan akan berdampak kepada Tingkat Kelahiran Total (TFR) yang diharapkan mencapai 2,09 per wanita. Keadaan ini akan diimbangi oleh tingkat re produksi netto per wanita sebesar 0,99.

e. Angka kelahiran kasar (CSR) diharapkan mencapai 17,9 angka kematian kasar (CDR) mencapai 4. 1; angka kematian bayi (IMR) mencapai 14,4; angka harapan hidup laki-laki mencapai 71,7 tahun; dan angka harapan hidup wanita mencapai 76,5 tahun.

f. Pada jangka panjang prospek pertumbuhan Kabupaten Kampar tetap mendorong berlangsungnya migrasi masuk yang diperkirakan mencapai 17,9%.

C. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Kondisi perekonomian Kabupaten Kampar kecenderungannya perkembangannya diwakili oleh hal-hal berikut

a. Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000, tanpa migas, pada tahun 2005, adalah sebesar Rp.3.45 triliun akan meningkat menjadi Rp. 18.20 triliun pada tahun 2025. dengan rata pertumbuhan sebesar 9, 13 %.

b. Bila diperhatikan struktur perekonomian Kabupaten Kampar didominasi oleh pertanian sebesar Rp. 2,08 triliun atau 60,22 persen pada tahun 2006 dan diperkirakan pada tahun 2025 sebesar 7,20 triliun atau 39,56 persen. Ini berarti terjadi pertumbuhan rata-rata selama rentang waktu 2005 -2025 sebanyak 6. 75 persen. Sektor pertanian merupakan leading sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Kampar dan bila diperhatikan tanaman perkebunan menguasai kehidupan masyarakat sekitar 60 % dan diikuti oleh kehutanan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

c. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2005 sebesar 149,18 milyar atau 4.31 persen, yang berasal dari galian golongan C (Bahan Galian Industri). Kemudian pada tahun 2025 diharapkan kontribusi sektor pertambangan sebesar Rp.614,03 milyar atau ... persen. Rata-rata selama tahun 2005-2025 adalah sebesar 7,73%. Sektor pertambangan umum (mineral, batu bara, dan

bahan galian industri) di Kabupaten Kampar akan memberikan kontribusi yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

- d. Sektor perdagangan sebesar Rp.360,44 milyar atau 10,42% pada tahun 2005 dan tahun 2025 diperkirakan Rp.2.242,57 milyar atau 112,32%. Rerata selama tahun 2005-2025 sebesar 10.10%. Sektor perdagangan berasal dari pedagang eceran dalam mendistribusikan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Kemudian berkembang hotel, penginapan serta restoran. Hal ini didukung dengan berkembangnya sektor pertanian sehingga mendorong munculnya pedagang hasil pertanian terutama perkebunan karet meupun kelapa sawit
- e. Berikutnya kontribusi sektor Industri Pengolahan pada tahun 2006 sebesar Rp. 280,32 milyar atau 8, 11 persen, dperkirakan tahun 2025 sebanyak Rp.4.037,36 milyar atau 22, 18 persen. Rerata pertumbuhan selama rentang waktu tahun 2005-2025 sebesar 15,07%. Sektor industri sangat didukung oleh bahan baku hasil pertanian, dengan berkembang industri rumah tangga yang mengolah bahan makanan dan aneka industri, disamping itu dalam menyediakan sarana produksi pertanian, pembibitan, alat-alat pertanian, pengolahan pakan ikan, pakan ternak dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, serta industri olahan kayu skala kecil berupa meubel. Selanjutnya akan muncul industri turunan CPO berupa minyak goreng, mentega, sabun, kosmetik dan turunan industri lainnya.
- f. Dalam rangka mendukung perkembangan Industri dan sektor lainnya maka diharapkan terjadi peningkatan kontribusi sektor listrik pada tahun 2025 yang akan datang dan bertitik tolak pada kontribusi sektor Listrik pada tahun 2005 sebesar Rp.3,63 milyar atau 0, 11 %, diperkirakan pada tahun 2025 sebanyak Rp.81,91 milyar atau 0,45 %. Rerata selama rentang waktu 2005-2025 adalah sebesar 17,81 %.
- g. Berikutnya kontribusi sektor Bangunan pada tahun 2005 sebesar Rp.145,39 milyar atau 4,20 %, diperkirakan pada tahun 2025 sebanyak Rp.1.055, 75 milyar atau 5.80 persen. Rerata selama rentang waktu 2005-2025 adalah sebesar 11,00 persen. Pertumbuhan sektor konstruksi dan bangunan, didukung oleh program pemerintah dalam pernbangunan jalan, jembatan, bangunan perkantoran pemerintah dan perkantoran perusahaan swasta, permukiman penduduk dan bangunan pasar dan pertokoan pusat perbelanjaan. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan industri bahan bangunan,terutama industri batu bata, batako. pengolahan pasir pasang dan pasir cor untuk bahan bangunan dan tersedianya batu-batuan yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan bendungan dan irigasi.
- h. Kontribusi sektor Pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2005 sebesar Rp. 120,83 milyar atau 3,49 persen, diperkirakan tahun 2025 sebesar Rp.800,00 milyar atau 4,39 persen. Rerata pertumbuhan selama rentang waktu tahun 2005-2025 sebesar 10,46 persen. Sektor angkutan untuk membuka isolasi wilayah dengan membangun prasarana jalan dan jembatan, diikuti perkembangan armada angkutan kota, antar kecamatan, antar kabupaten, antar wilayah, terutama dalam mendukung mobilitas penduduk dan angkutan orang dan barang hasil pertanian serta angkutan dalam mendukung arus lalulintas orang dan barang kebutuhan sekunder antar wilayah. Selain itu berkembangnya armada angkutan sungai dalam memperlancar arus barang dan penumpang, sehingga mempercepat arus barang-barang yang dihasil produsen ke tempat tujuan konsumen.

- i. Kontribusi sektor Keuangan dan perbankan pada tahun 2006 sebesar Rp. 41,78 milyar atau 1,21%, diperkirakan tahun 2025 sebesar Rp 287,21 milyar atau 1.58%. Rerata pertumbuhan 10,68% selama rentang waktu 2005-2025. Sektor keuangan dan perbankan berperan dalam menyediakan dana yang dibutuhkan dunia usaha, sehingga kebutuhan modal usaha dan investasi yang dibutuhkan pelaku ekonomi baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar serta koperasi.
 - j. Kontribusi sektor Jasa pada tahun 2005 sebesar Rp.274,28 milyar atau 7,93 persen, diperkirakan pada tahun 2025 sebanyak Rp.1.882,12 milyar atau 10,34%. Rerata pertumbuhan selama rentang waktu 2005-2025 adalah sebesar 10,67%. Sektor jasa berupa pelayanan publik yang disediakan pemerintah maupun yang diusahakan masyarakat dalam pendidikan, kesehatan, pariwisata, lembaga bantuan hukum, konsultan, pendamping masyarakat dan jasa lainnya.
 - k. Meningkatnya daya saing ekonomi antar wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif maka diperlukan menekan penyebab ekonomi biaya tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pelayanan publik dengan kelembagaan yang ramping dan dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan biaya yang transparan serta rasa aman.
 - l. Disamping itu memberikan response dan sikap yang peka terhadap pengaruh dari luar, terutama memberikan perlindungan pada usaha kecil tempatan. Selanjutnya dengan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terwujudnya aparatur yang profesional.
 - m. Pada tahun 2005 pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan Rp 5.447.357,02 dan pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat 6 kali lipat dari posisi tahun 2005 dengan asumsi proyeksi total PDRB Kabupaten Kampar 2025 dapat tercapai.
 - n. Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten kampar dan mampu mendorong pembukaan lapangan berusaha secara lebih luas seperti: pada sektor perdagangan, industri, jasa, investasi, dan sektor lainnya.
 - o. terbukanya pasar domestik dan regional bagi produk perikanan darat telah mendorong perkembangan ekonomi sehingga menciptakan kesempatan kerja dan didukung oleh sektor transportasi untuk memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
2. Permasalahan di bidang perekonomian yang menjadi perhatian dalam jangka panjang adalah:
- a. Pembangunan sektor non-migas yang bertumpu pada sumber daya alam diperbaharui belum menunjukkan perkembangan yang berarti, walaupun potensi yang dapat dikembangkan cukup luas, seperti pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan agrobisnis; pemanfaatan hasil hutan non kayu; pariwisata; sektor informal dan usaha kecil menengah; dan industri rumah tangga.
 - b. Dari 1.098.346 Ha luas Kabupaten Kampar diantaranya 12.608 Ha (1,15 %) digunakan untuk tanah sawah dan 1.085.738 Ha (98,85 %) merupakan lahan kering. Selanjutnya dari 98,85 % luas lahan kering di Kabupaten Kampar tahun 2005, sebagian besar digunakan untuk perkebunan (kecuali hutan). Kondisi lahan pertanian yang senantiasa mengalami degradasi dan miskin unsur hara, rendahnya input pertanian berupa pupuk dan kapur, serta cara pengolahan yang tidak

optimal mengakibatkan berkurangnya produktifitas dan menurunnya mutu produk pertanian. Umumnya pertanian diusahakan pada lahan dengan tingkat kesuburan rendah dan bermasalah, yaitu berupa tanah podzolik merah kuning (PMK), dan gabut air tawar

- c. Disamping itu, pengusahaan lahan pertanian juga menghadapi permasalahan konflik penguasaan dan status lahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penguasaan sektor hilir oleh perusahaan berskala besar karna bersifat pada modal dan keahlian mengakibatkan hasil pertambahan nilai belum dinikmati oleh masyarakat lokal.
- d. Pemasaran hasil pertanian masih terkendala oleh ketersediaan infrastruktur, mutu produk, dan teknologi paska panen yang belum memenuhi tuntutan pasar.
- e. Sebagai penerap tenaga terbesar, maka pengembangan sektor pertanian perlu diupayakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, serta pembangunan agro industri dan agrobisnis untuk meningkatkan nilai tambah sektor ini. Kendala yang dihadapi adalah intensifikasi tanaman hortikultura umumnya dilakukan pada lahan yang sempit, teknologi tradisional dan modal terbatas sedang pasar berskala lokal.
- f. Dalam rangka keberlanjutan dan pemerataan pembangunan, pada jangka panjang dibutuhkan penataan kembali kawasan hutan dengan memprioritaskan kawasan hutan produksi pada hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI) dibandingkan hutan alam ; pemanfaatan lahan terlantar ; serta pengembangan HKM dan HPHTC untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena industri perkayuan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, maka dukungan terhadap industri tersebut perlu dilakukan melalui penerapan pola pengelolaan yang lebih luas.
- g. Kabupaten Kampar memiliki berbagai potensi sumber daya pertambangan di luar migas, antara lain Batu bara dan pertambangan galian C. Potensi sumber daya pertambangan tersebut umumnya masih berada pada tahap eksplorasi. sehingga pemanfaatannya pada masa mendatang perlu diupayakan melalui kegiatan eksplorasi lanjut dan perencanaan eksploitasi dan pengelolaan.
- h. Potensi pariwisata alam dan budaya belum dikembangkan secara luas, baik obyek dan destinasi; prasarana dan sarana pendukung serta sumber daya manusia pelaku pariwisata, sehingga sebagian besar belum layak dijual kepada wisatawan. Peluang kunjungan wisatawan mancanegara cenderung dimanfaatkan oleh Kota Pekanbaru yang memiliki prasarana pendukung relatif memadai, seperti hotel, transportasi, dan perbankan. Selain pariwisata alam dan budaya, potensi lainnya adalah pariwisata Meeting Incentive Conference, and Exhibition (MICE).
- i. Adanya disparitas perkembangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Kampar bagian antara kawasan perkotaan dengan pedesaan: Disparitas perkembangan antara lain disebabkan terjadinya pemusatann usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan investasi beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah.
- j. Sebagian masyarakat masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan umumnya dihadapi oleh masyarakat di pedesaan yang perekonomiannya bersifat subsisten, produktifitas rendah, dan berkeahlian rendah. Hambatan dalam pengembangan investasi berbasis masyarakat lokal antara lain adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk peningkatan investasi. Rendahnya kemampuan penduduk tempatan juga mengakibatkan rendahnya daya saing dalam pasar kerja

- k. Pengembangan perrekonomian membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi dan penataan ruang, kepastian hukum, dan pelayanan aparatur dalam administrasi umum. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan bidang pemerintahan dan aparaturnya menuju good governance and clean government
 - l. Lembaga Keuangan dan perbankan belum berfungsi dan merata pada seluruh wilayah Kabupaten Kampar.
3. Dalam rangka pembangunan perekonomian daerah, potensi geostrategis, kekayaan alam, kekayaan budaya, dan keamanan dan ketertiban yang dimiliki Kabupaten Kampar perlu dimanfaatkan antara lain:
- a. Posisi Kabupaten Kampar yang strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Sisingi, Siak dan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kampar berada pada jalur perekonomian Provinsi Riau bagian tengah; dan berada pada lintasan pergerakan antara wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas orang, barang, informasi, dan modal.
 - b. Sebagaimana kawasan lainnya di Provinsi Riau, maka Kabupaten Kampar yang berada pada kawasan tropis basah sangat sesuai untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, disamping itu, memiliki berbagai potensi sumber daya alam lainnya, seperti aneka tambang. Kondisi geomorfologi berupa hamparan yang luas sangat mendukung pembangunan perkebunan, terutama tanaman keras.
 - c. Lahan untuk dikonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan hortikultura masih tersedia, di samping pemanfaatan lahan terlantar dan hutan sekunder yang belum dimanfaatkan. Hal ini terkait dengan masih terbukanya peluang pasar domestik, regional dan internasional bagi produk pertanian dan kegiatan industri hilirnya.
 - d. Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang baik merupakan perwujudan kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut terbangun oleh kehidupan masyarakat yang damai, toleransi antar etnis dan agama, serta kesiagaan dalam menghadapi gangguan sosial.
 - e. Budaya Adat Istiadat yang bersendikan agama, mampu memayungi kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan potensi yang fundamental bagi kelangsungan kegiatan perekonomian.
 - f. Korjasama ekonomi regional yang memberikan peran secara khusus bagi Kabupaten Kampar melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth triangle (IMTGT), Asean Free Trade Association (AFTA) dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi daerah ini secara terpadu dengan wilayah nasional lainnya, antara lain Kabupaten Kampar sebagai pusat pengembangan agrobisnis, Agroindustri dan Agrowisata.
4. Selain peluang yang dimanfaatkan pengembangan perekonomian juga menghadapi hambatan seperti :

- a. Dengan hadirnya new growing economic countries di asia tenggara, seperti China dan Vietnam menambah persaingan dalam pasar regiona dan internasional.
 - b. Kebijakan dan strategi negara-negara tengga yang lebih maju dalam berinvestasi pada bidang perkebunan dan kehutanan telah menghilangkan peluang untuk memperoleh keuntungan dari nilai tambah produk primer.
 - c. Belum mapannya sistem demokrasi yang dibangun mengakibatkan instabilitas politik dan keamanan di indonesia secara umum, sehingga pelaksanaan birokrasi dan regulasi kurang berjalan efektif. Kondisi ini menurunkan minat investasi oleh pihak lain, sebagaimana terlihat dari jumlah dan nilai investasi yang fluktuatif.
 - d. Belum adanya keberpihakan lembaga perekonomian kepada masyarakat secara taat asas sebagaimana ditunjuk oleh monopoli teknologi dan pemasaran produk oleh perusahaan berskala besar yang cenderung bersifat parasitik, sehingga kegiatan masyarakat, seperti perkebunan rakyat sulit mencapai kemajuan.
5. Jika pembangunan perekonomian dan pemanfaatan sumber daya alam pada jangka panjang dapat dilaksanakan secara taat asas, maka diharapkan dapat dicapai kondisi berikut:
- a. Peningkatan PDRB, dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun jika tidak terjadi peningkata PDRB yang berarti, maka penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan akan bertambah.
 - b. Peningkatan produktivitas masyarakat disemua sektor agar tetap dapat memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Kampar. Tanpa upaya tersebut, tidak meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga akan berakibat pada beban pengembangan dalam jangka panjang.
 - c. Penciptaan iklim Investasi yang kondusif, diharapkan nilai investasi meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pada jangka panjang mampu meningkatkan sektor perdagangan sebagai lokomotif ekonomi daerah.
 - d. Upaya pembangunan ekonomi secara makro perlu didukung oleh keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Dukungan tersebut diupayakan melalui pembangunan agrobisnis dan agroindustri berskala lokal yang mengintegrasikan kegiatan budidaya (onfarm) dengan Pasca Panen (off farm) untuk meningkatkan nilai tambah produk primer dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat tempatan, termasuk bidang perikanan dan peternakan. Pada jangka panjang agrobisnis dan agroindustri tersebut diupayakan dapat memasuki pasar internasional melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan manajemen, dan penyediaan infrastruktur wilayah.
 - e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura diupayakan untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Potensi alam dan budaya yang didukung oleh masyarakat agamis dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berupa wisata alam, wisata religi, wisata budaya dan agrowisata bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

D. Sosial Budaya Dan Politik

1. Permasalahan di bidang sosial budaya dan politik meliputi:

- a. Pergeseran nilai-nilai budaya akibat dari pengaruh budaya luar yang negatif berpengaruh signifikan terhadap Budaya Adat Istiadat yang bersendikan atas adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah sebagai budaya tempatan. Hal tersebut disebabkan oleh arus globalisasi yang semakin kuat dan terbukanya akses informasi yang tidak dapat dicegah. Manifestasi nilai-nilai adat istiadat yang bersendikan agama melalui ragam budaya, busana, adat perkawinan dan kebiasaan lain yang mencirikan khas Adat istiadat yang bersendikan agama perlu dikembangkan terus menerus.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kampar sebagai negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam lingkungan Masyarakat Agamis tahun 2025, belum terlaksana secara optimal sebagaimana diharapkan. Sikap masyarakat kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Adat Istiadat yang bersendikan agama masih terbatas pada simbol-simbol artifisial dan belum taat azas.
 - c. Penafsiran kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah secara kurang tepat oleh sebagai pihak, seperti tercermin dari keinginan untuk pemekaran daerah yang bersifat elitis, berpotensi menyebabkan disintegrasi lokal dan nasional.
 - d. Pluralisme ideologi keagamaan dan budidaya serta kesenjangan sosial di sebagian wilayah berpotensi menimbulkan konflik sosial yang bersifat horizontal.
 - e. Pergeseran nilai sosial memberikan dampak semakin kompleksnya permasalahan sosial dalam masyarakat, seperti kriminalitas, bahaya narkoba, anak jalanan, prostitusi, aborsi, penyakit masyarakat lainnya.
2. Usaha dan keberhasilan pembangunan sosial budaya dan politik yang dapat dicapai hingga kini adalah:
- a. Kebijakan penerapan nilai-nilai budaya yang didasarkan atas adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, telah diawali beberapa tahun lalu oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui arsitektur bangunan balai adat, rumah adat dan perkantoran sesuai, dengan arsitektur Kampar; penulisan arab melayu bagi nama jalan, kantor, dan fasilitas milik Pemerintah Daerah, berbusana muslim pada hari kerja serta berpakaian melayu pada hari tertentu. Adat istiadat yang bersendikan agama pada jam dan hari kerja tertentu acara nasional dan daerah tertentu; makanan; adat istiadat dalam perkawinan; peringatan hari besar Islam; dan penerapan kurikulum lokal pada seluruh jenjang pendidikan negeri, swasta, formal, dan informal.
 - b. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kampar telah diupayakan pembangunan nilai-nilai adat dalam masyarakat Kabupaten Kampar melalui pemberdayaan lembaga adat dan pemangku adat serta peningkatan sarana dan prasarana adat.
 - c. Keberhasilan politik yang telah diraih dengan dilaksanakannya pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden tahun 2004 dan Pilkada secara langsung tahun 2006. Dalam pelaksanaan agenda politik tersebut tidak tercatat adanya tindak kekerasan yang menjurus pada tindakan anarkis dan menelan korban jiwa. Protes dan ketidaksepakatan diantara calon yang tidak terpilih seluruhnya terwujud dalam batas toleransi yang dapat diselesaikan secara hukum. Hal tersebut merupakan modal awal yang penting bagi berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.

- d. Telah terbangun kesadaran politik publik dalam melaksanakan pilkada secara langsung. Kesadaran tersebut menguat dengan dipahaminya pluralitas dan kemajemukan sebagai penajaman demokratis, di tingkat lokal.
 - e. Stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kampar hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dan telah menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pada masa mendatang. Kondisi tersebut didukung pula oleh kehidupan beragama yang religius, toleransi dan kerukunan yang tinggi, semangat persaudaraan dan kekeluargaan, budaya dan falsafah hidup masyarakat yang bersendikan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, tekanan ekonomi dan tingkat persaingan hidup yang relatif belum ketat, sehingga masyarakat kabupaten Kampar lebih bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan dan potensi konflik di masyarakat. Dengan dukungan prasarana peribadatan yang memadai, secara umum kehidupan keagamaan masyarakat kabupaten Kampar sangat kondusif, tercermin dari frekuensi dan intensitas kejadian konflik berlatar belakang agama yang sangat rendah serta penyelenggaraan hari besar keagamaan yang lancar dan aman.
3. Dalam rangka penguatan terbentuknya masyarakat Kabupaten Kampar yang madani, maka berbagai peluang terbuka bagi kepentingan perkembangan aspek sosial budaya dan politik, yakni :
- a. Penerapan kebijakan desentralisasi membuka peluang inisiatif daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan mempercepat penerapan nilai-nilai budaya, Adat bersendikan syarat-syarat bersendikan kitabullah.
 - b. Tersedianya potensi budaya masyarakat Kabupaten Kampar yang mengandung filsafah adat bersendikan syarat-syarat bersendikan kitabullah dan posisi geografis Kabupaten Kampar memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
4. Pembangunan sosial budaya dan politik dalam jangka panjang menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi yaitu :
- a. Arus globalisasi yang bergerak secara pesat serta perkembangan teknologi yang membuka akses informasi secara luas memberikan tantangan terhadap degradasi nilai-nilai luhur budaya. Adat istiadat yang bersendikan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Globalisasi yang membuka akses terhadap informasi, modal, dan kesempatan kerja berpotensi menghilangkan identitas Adat Istiadat yang bersendikan agama, mengancam eksistensi budaya lokal, serta mengubah perilaku menjadi semakin permisif. Tantangan tersebut membutuhkan jawaban melalui kontinuitas dan konsistensi kebijakan penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Upaya menuju penerapan nilai-nilai Budaya, Adat Istiadat bersendikan agama yang Islami membutuhkan keteladanan para pemimpin lokal secara nyata dan langsung, baik melalui kepemimpinan formal pada jajaran birokrasi pemerintah daerah maupun kepemimpinan informal melalui tokoh-tokoh masyarakat.
 - c. Pluralisme ideologi keagamaan di sebagian kawasan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial bersifat horizontal membutuhkan kebijakan yang memberikan penyadaran bagi para tokoh agama tentang Visi Kabupaten Kampar

sebagai Negeri Berbudaya, Berdaya dalam lingkungan masyarakat Agamis tahun 2025.

- d. Secara nasional sedang berlangsung transformasi budaya politik menuju demokrasi yang masih berada pada tahap awal. Proses perubahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik yang dapat mengancam stabilitas politik di daerah.
 - e. Masih berkembangnya interpretasi otonomi daerah yang kurang tepat yang sebagian ditafsirkan sebagai pemekaran daerah yang bersifat elitis membutuhkan kebijakan guna membangun paradigma bahwa berpolemik dapat menghambat pembangunan daerah terhadap para elit politik.
5. Melalui pembangunan di bidang sosial budaya dan politik pada jangka panjang diharapkan dapat mempercepat :
- a. Terwujudnya masyarakat madani dalam budaya adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah dengan kultur yang mengedepankan penegakan dan penghormatan terhadap hukum dalam aspek kehidupan, menjunjung tinggi nilai norma, budaya dan etika serta toleransi dpaalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Terwujudnya stabilitas politik yang didukung oleh falsafah adat bersendikan kitabullah dan tata pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa.
 - c. Terciptanya budya politik masyarakat melalui penanaman nilai-nilai demokratis yang ditandai oleh (a) terwujudnya kesadaran akan penghormatan HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media (b) terwujudnya berbagai wacana dan dialog untuk membentuk kesadaran mengenai kepentingan memelihara persatuan bangsa, dan (c) terwujudnya demokratisasi politik lokal.
 - d. Terjadinya pergeseran nilai-nilai social kemasyarakatan seiring dengan arus globalisasi yang ditanggapi melalui revitalisasi dan modernisasi nilai-nilai budaya adat istiadat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.
 - e. Terciptanya kondisi social politik di Kabupaten Kampar yang kondusif untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kampar.

E. Prasarana dan Sarana

1. Prasarana dan Sarana

Sistem prasarana dan sarana merupakan pendukung utama berfungsinya system sosial, ekonomi, dan penataan ruang. Prasarana dan sarana wilayah utam yang mendukung pembangun meliputi prasarana transportasi, sarana listrik dan ke-energi-an dan sarana telekomunikasi.

a. Tranportasi Darat

- 1) Persoalan prasarana jalan adalah tidk sebandingnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor dengan penambahan jumlah panjang jalan, sehingga hal ini mengakibatkan padatnya frekurnsi penggunaan jalan. Terutama jalan Pekanbaru-Bangkinang tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi tabrakan dan kecelakaan. Untuk itu perlu pelebaran jaln seperti jalan dua jalur. Prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Kampar adalah terdiri dari perhubungan darat dan sungai.

- 2) Untuk transportasi darat di Kabupaten Kampar Panjang jalan yang ada di “Negreri Serambi Mekkah” ini seluruh berjumlah 1.847,58 Km yang terdiri dari permukaan jalan yang di aspal 502,51 Km (27,19 persen), jalan kerikil 1.106,84 Km (59,91 persen), dan jalan tanah 237,53 Km (12,86 persen). Mengingat kondidi jalan sebahagian besar masih kerikil dan tanah, maka akibatnya kualitas jalan juga beragam yakni 11,63 persen yang berada dalam kondisi baik, 59,28 persen dalm kondisi sedang dan 29,09 persen atau sepanjang 540,80 Km dalam keadaan rusak.
- 3) Di Kabupaten Kampar terdapat jalan propinsi sepanjang 84,34 Km yang seluruhnya dalam kondisi berasoal, dan jalan Kabupaten sepanjang seluruh 1.847,58Km dengan kondisinya permukaan jalan yang beragam, sehingga masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas jalan agar aksesibilitas masyarakat, terutama terhadap hasil produksi masyarakat akan semakin lancer yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
- 4) Fasilitas prasarana tranportasi darat lainnya yang tersedia adalah berupa 1 terminal bus dengan kondisi relative kurang memadai dan letaknya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota karena berada di pusat keramaian kota.

Agenda pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dalam masa 20 tahun yang akan dating melalui antara lain:

- a. Jalan Rantau Berangin-Pekanbaru saat ini sudah padat lalu lintasnya sehingga tidak mendukung aktivitas kelancaran lalu lintas orang dan barang, untuk itu masa dating diperlukan 2 jalur dengan pengaspalan hot mix, jika memungkinkan ada jalur cepat, lajur sedang dan lajur lambat.
- b. Dalam rangka pengamanan batas wilayah Kabupaten Kampar perlu diingatkan pembangunan jalar alternatif meliputi: Simpang baru-pantai cermin-SP V Bukit Sembilan-Kuok dan Rantau Berangin, peningkatan jalan Bangkinang-Lipat Kain, peningkatan jalan simpang Suram-Sinama Nenek. Peningkatan jalan Lipat Kain-Lubuk Agung-Batu Sasak-Batas Sumbar, peningkatan jalan Simpang Baru-Pantai Cermin-Petapahan, jalan alternatif dari Simpang Membourt Tapung Hilir-Simp.Suka Ramai Tapung Hulu dan Kasikan-Sei Agung-Petapahan, Bencah Kelubi-Kota Garo, Danau Bingkuang-Kubang Raya, Pasir putih-Pematang Kayu Arang.
- c. Dalam rangka membuka daerah-daerah yang masih terisolir di Kabupaten Kampar diperlukan pembukaan jalan baru terutama di Kampar Kiri Hulu dan daerah lainnya.
- d. Selain distribusi prasarana jalan, lebih dari sepertiga aringan jalan yang ada juga dalam kondisi rusak dan Sebagian belum diperbaiki. Sebagian jaringan jalan yang rusak adalah jalan Kabupaten dan jalan non status, sehingga menjadi kendala bagi kegiatan koleksi distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia antara pusat-pusat utama dengan pusat lokal dan sentra produksi.
- e. Dukungan prasarana dan pelayanan terminal sebagai pemandu moda transportasi pada pusat-pusat kegiatan belum memadai, termasuk kebutuhan terminal untuk angkutn barang, khususnya untuk jarak jauh.

- f. Kebijakan nasional pembangunan transportasi dan penataan ruang pada skala Pulau Sumatera mengindikasikan kebutuhan pembangunan jaringan kereta api Lintas Sumatera (*Trans Sumatera Railway*) untuk pergerakan jarak jauh, berat dan massal. Dalam perspektif pembangunan Kabupaten Kampar pada jangka Panjang sebagai bagian dari pembangunan regional dan nasional, maka jaringan kereta api merupakan salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan, terutama dikaitkan dengan angkutan produk-produk pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya.
- g. Keterpaduan antar moda transportasi di Kabupaten Kampar merupakan prasyarat utama dalam pembentukan struktur ruang dan pemerataan perkembangan wilayah. Posisi strategis Kabupaten Kampar memperkuat kepentingan terbentuknya keterpaduan antara moda transportasi, termasuk integrasi moda transportasi yang melayani jarak jauh, kapasitas massal, angkutan berat, kecepatan tinggi, dan ongkos angkutan yang terjangkau.

b. Prasarana Listrik dan Keenergian

- 1) Pada saat ini energi listrik disediakan oleh sistem Interkoneksi Sumatera Barat-Kabupaten Kampar berasal dari PLTA Singkarak, PLTU Ombilin, dan PLTA Kota Panjang dan sistem terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150KV dari Payakumbuh ke Koto Panjang sepanjang 166Km dan Gardu Induk Bangkinang terkapasitas 1x10 MW.
- 2) Rasio elektrifikasi tercatat sebesar 38% atau lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 57%. Oleh karena itu disamping tingkat pelayanan listrik yang rendah, kualitas pelayanan juga belum memadai sebagaimana terlihat dari pemadaman listrik secara bergilir. Kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat luas yang semakin meningkat juga menghadapi kendala, terutama warga pedesaan.
- 3) Pada jangka Panjang penyediaan listrik dan sumber-sumber energi lainnya yang diperlukan oleh industri dan domestik perlu diupayakan dengan mempertimbangkan diversifikasi sumber listrik dan energi, skala pelayanan, dan efisiensi pembangkit dan transmisinya. Alternatif yang dapat dikembangkan selain PLTA adalah pembangunan PLTG, PLTD, PLTU, dan PLTMH dengan memanfaatkan sumber gas alam, air, batu bara dan khusus untuk PLTD secara berangsur-angsur di kurangi, sedangkan sumber energi untuk bahan bakar dan perkotaan selain BBM perlu mempertimbangkan pemanfaatan energi gas dan bahan-bahan nabati.

c. Pelayanan Telekomunikasi

- 1) Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana komunikasi ini semakin tinggi. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah pengguna jasa telekomunikasi dari jenis alat yang digunakan maupun intensitas penggunaannya..
- 2) Jenis telekomunikasi tidak bergerak (station) hingga saat ini sudah banyak digunakan di daerah pedesaan berupa penggunaan satelit dan penggunaan pemancar radio untuk yang tidak terjangkau atau yang jalur kabelnya padat,

seperti yang dilakukan oleh Telkom ataupun Satelitindo. Demikian pula terhadap penggunaan jenis peralatan telekomunikasi lainnya untuk bergerak (mobile) yang kompetisinya semakin ketat, seperti yang dilakukan oleh sejumlah operator telekomunikasi seluler.

- 3) Pelayanan telekomunikasi pada saat ini dilayani oleh PT Telkom Divisi Regional 1 Sumatera, PT Indosat, operator telekomunikasi seluler oleh swasta, dan *rural radio* untuk kawasan pedesaan. Pelayanan PT Telkom didukung oleh *central gateway* di Pekanbaru, 24 STO di ibukota Kabupaten/Kota dan ibukota kecamatan, transmisi gelombang mikro dan UHF, dan *repeaters*

2. Tata Ruang

- a. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar yang berlaku sampai saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 1999, Tata Ruang ini disusun sebelum kabupaten Kampar dimekarkan, yang mencakup untuk tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Perwujudan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar mengidentifikasi adanya disparitas perkembangan dan pembangunan antar wilayah kampar bagian utara dan selatan dengan tengah, antara Kawasan perkotaan dan pedesaan, antara Kawasan perbatasan barat dengan Kawasan perbatasan timur
- c. Wujud tata ruang wilayah dimaksud diatas antara lain dibentuk oleh sistem pusat-pusat pertumbuhan belum berlembang secara hirarkis, kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana wilayah serta dipengaruhi oleh kondisi dan fungsi Kawasan yang kurang mendukung. Disamping itu Kawasan wilayah Kampar bagian utara dan selatan merupakan wilayah pengembangan yang masing-masing berasal dari satu kecamatan yaitu Kecamatan Taoung (bahagian dari Kecamatan Siak Hulu) untuk Kawasan utara dan Kecamatan Kampar Kiri untuk Kawasan selatan. Kedua Kawasan ini secara bertahap telah dimekarkan, dimana kecamatan tapung dimekarkan menjadi tiga kecamatan dan dan Kampar Kiri lima kecamatan.
- d. Kota Bangkinang sebagai ibukota kabupaten memiliki kecenderungan tumbuh lebih cepat dari wilayah lainnya di Kabupaten Kampar, kondisi ini terutama disebabkan disamping sebagai pusat pemerintahan, kota Bangkinang berada pada berada pada lintas antar Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Provinsi Riau Pekanbaru, demikian pula kecamatan yang berada disepanjang jalan nasional ruas Pekanbaru-Sumatera Barat seperti Kecamatan Bangkinang Barat, Salo, Kampar, Kampar Timur dan Kecamatan Tambang dengan perkembangan yang lebih cepat dari kecamatan lainnya.
- e. Sistem prasarana wilayah yang memiliki jaringan jalan, jaringan angkutan sungai dan penyebrangan juga mengidentifikasi penyebaran sarana prasarana yang belum merata dan belum terbentuknya struktur yang hirarkis dan terpadu. Hal ini juga menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan antar bagian wilayah di Kabupaten Kampar, seperti sarana jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan wilayah bagian selatan, serta masih terbatasnya jembatan sebagai pengganti alat transportasi penyebrangan hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kampar.
- f. Disamping itu permasalahan ruang yang terjadi di Kabupaten Kampar karena belum sinkronnya antara Tala Guna Hutan kesepakatan (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts tanggal 6 Juni 1986) dengan perda provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau,

disamping itu terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan Kawasan hutan sebagai akibat pembukaan dan pengembangan perkebunan oleh perusahaan-perusahaan besar, Hutan Tanam Industri (HTI), pertumbuhan penduduk dan desakan ekonomi masyarakat, sehingga banyak terjadi perubahan alih fungsi Kawasan kehutanan menjadi Kawasan budidaya, pertanian maupun permukiman masyarakat. Berdasarkan hasil interpretasi Citra Landsat 7+ tahun 2006 luas hutang yang beralih fungsi mencapai 150.312,91Ha

- g. Terdapatnya pemukiman penduduk yang berada dikawasan konservasi suaka marga satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, didalam Kawasan ini terdapat tujuh desa (Desa Terusan, Batu Sanggah, Gajah Bertalut, Aur Kuning, Tanjung Beringin, Pangkalan Serai dan Desa Subayang Jaya) yang keberadaannya sudah ada jauh sebelum wilayah ini ditetapkan wilayah ini ditetapkan sebagai Kawasan suaka marga satwa.
- h. Keberadaan waduk PLTA Koto Panjang yang memiliki area genangan seluas lebih kurang 12.000 Ha merupakan Kawasan yang oerlu dipertahankan fungsi konservasinya, saat ini telah mengalami penurunan elevasi terutama pada musim kemarau yang diakibatkan rusaknya Cathment Area yang Sebagian besar berada di wilayah Sumatera Barat. Di samping itu Kawasan hijau yang diperlukan 500-1000 meter dari bibir waduk telah terjadi kerusakan disepanjang pinggiran waduk yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk usaha pertanian, perkebunan, dan pemukiman liar, yang berada pada aliran sungai di dua provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Mengingat PLTA Koto Panjang merupakan proyek Nasional, untuk pengamanan waduk PLTA dimaksud perlu adanya kebijakan pemerintah pusat pada masyarakat di dua provinsi tersebut.
- i. Kawasan Air Weapon Range (AWR) Siabu yang pada awalnya merupakan Kawasan pinjam pakai dari Pemerintahan Kabupaten Kampar seluas 10.658 Ha yang terletak pada Kawasan ini masih digunakan oleh pihak Angkatan Udara untuk latihan tembak. Menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007, Ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan wilayah dan ,akhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Keberadaan AWR siabu telah menghilangkan fungsi ruang udara radius 60kilometer atau hampir seluruh ruang udara Kabupaten Kampar dikuasai oleh AWR, artinya AWR telah mempengaruhi fungsi struktur ruang Kabupaten Kampar yakni sebagai pusat pemukiman dan system jaringan sarana dan prasarana serta fungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Dari kenyataan tersebut AWR sangat merugikan daerah Kabupaten Kampar dalam segala aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu perlu dilakukan realokasi AWR dari wilayah Kabupaten Kampar.

3. Prasarana Sosial

- a. Secara umum penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana sosial di Kawasan perkotaan yang baru berkembang dan Kawasan pedesaan masih mengalami keterbatasan, baik dari jumlah dan kualitas pelayanannya. Keterbatasan tersebut meliputi prasarana perumahan, Pendidikan, Kesehatan, penerangan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.

- b. Berbagai program yang telah dilaksanakan perlu ditingkatkan terutama dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pembangunan terutama penyelenggaraan program penyediaan prasarana dan sarana sosial menjadi sangat relevan, terutama bagi ibukotakecamatan, Agropolitan dan kawasan tertinggal.

F. Pemerintahan

1. Pemerintahan kabupaten Kampar untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 dengan ibukota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor : KTPS.318/VII/1987 tanggal 17 juli 1987. Pembantu Bupati wilayah I berkedudukan di pangkalan kerinci. Pembantu Bupati wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam. Pangkalan Kuras, Banut dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati Wilayah I dan II berada langsung di bawah coordinator Kabupaten.
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Juncto surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 kabupaten Pelalawan. Konsekuensi dari adanya pemekaran ini timbulnya permasalahan tapal batas yang belum tuntas, hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi dan perbedaan interpretasi terhadap dokumen batas yang ada. Untuk itu perlu segera mengadopsi batas administrasi sesuai undang-undang Nomor 53 tahun 1999 kedalam RTRW Kabupaten, kemudian terhadap adanya permasalahan tapal batas di lapangan yang menurut undang-undang tersebut diatas perlu segera diselesaikan oleh pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Setelah pemekaran kabupaten Kampar sekarang terdiri atas 20 wilayah administrasi kecamatan dengan 219 desa/kulurahan. Disamping perangkat kelembagaan eksekutif yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor sesuai dengan peraturan daerah tentang struktur organisasi pemerintahan. Kelembagaan legislative yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) keanggotaannya berjumlah 45 orang, yang terdiri dari beberapa partai politik mendapat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pemilihan umum tahun 2004 lalu. Kelembagaan yudikatif, (pengendalian dan kejaksaan negeri) serta perangkat pemerintah lainnya seperti kesatuan TNI (kodim dan batalyon infantri 132/bs) dan kepolisian negara (Polres).
4. Dengan otonomi Daerah diharapkan beberapa hal itu: a) Terwujudnya keadilan antara kemampuan dan hak daerah, b) Peningkatan pendapat asli daerah (PAD) dan penerimaan pendapatan dari sumber-sumber lainnya yang optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, c) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan daerah.

5. Sejalan dengan adanya reformasi pemerintahan dari sentralisasi bergeser ke desentralisasi didukung oleh undang-undang No.22 tahun 1999 dengan memberikan kewenangan penuh baik dari eksekutif maupun legislatif, sehingga kewenangan penuh, bahkan legislatif mempunyai kewenangan untuk mengesahkan anggaran dan dapat melakukan impectment atau memberhentikan kepala daerah, jika laporan pertanggungjawabnya tidak dapat diterima. Kemudian dalam pelaksanaannya undang-undang 22 tahun 1999, dirubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, karena kewenangan yang sudah diberikan, ditarik Kembali ke pemerintah pusat pemerintah kabupaten dalam pertanggungjawabannya kepada pemerintah provinsi dan seterusnya pemerintah provinsi bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.
6. Tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat mensyaratkan dukungan kelembagaan yang kuat, pembagian kewenangan dan kewajiban yang tepat, dan kebijakan yang terarah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya penataan dan penguatan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kampar dari aspek organisasi beserta aparturnya, guna mengoptimalkan koordinasi internal pemerintahan dan menghindarkan duplikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
7. Walaupun jumlah aparatur pemerintahan cukup memadai guna melaksanakan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, namun masih dihadapi kendala dari segi kualifikasi, kompetensi, profesionalitas, dan integritas, sehingga belum menghasilkan kinerja yang prima. Kelemahan aparatur pemerintah dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju menghambat perencanaan kegiatan satuan kerja; kurang responsive terhadap tuntutan keadaan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Selain kelemahan dari segi kapasitas intelektual, kinerja aparatur pemerintahan juga menghadapi kendala dari segi integritas yang diindikasikan oleh masih melekatnya budaya KKN. Hal tersebut menyebabkan menurunnya citra aparatur dan wibawa pemerintah.
8. Dalam penyelenggraan tanggung jawab pelayanan umum belum seluruhnya ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, terutama dikawasan perdesaan. Hal ini berkaitan dengan skala prioritas dalam menentulan program kegiatan, pembangunan prasarana dan sarana pelayanan umum, kesiapan Lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan umum berbasis menejemen modern, dan kemampuan serta kompetensi aparatur dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
9. Apresiasi pemerintahdaerah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagai Langkah awal yang baik, pada saat ini telah diambil kebijakan pelayanan umum melalui apresiasi masyarakat. Pada jangka Panjang,kebijakan *Cararacter community building* dikembangkan dalam rangka menyongsong terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang madani dengan kemajuan diseluruh aspek kehidupan dan tuntutan peran serta yang demokratis dalam pembangunan daerah, sehingga pada masa mendatang terbangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
10. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang diikuti penataan perizinan dan berbagai bentuk insentif yang memberikan peluang bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Kampar, maka penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Penumbuhan budaya birokrasi yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan menjadi prasyarat utama dalam menghadapi perkembangan pada jangka panjang. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu prasyarat utama dalam menghadapi tantangan masa depan.

11. Menuju pembangunan di masa depan, diupayakan pemertapan dan penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai kewenangan, urusan dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur pemerintah, perbaikan dan penyempurnaan pelayanan administrasi umum yang dibutuhkan masyarakat luas dan penegakan supremasi hukum dan HAM dalam pelayanan umum.
12. Pembangunan jangka Panjang bidang pemerintahan dapat mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat yang prima dan sekaligus membantu terwujudnya masyarakat yang madani. Keberhasilan tersebut akan terwujud dalam bentuk:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pelayanan administrasi publik yang akuntabel, berwibawa, dan berkeadilan.
 - b. Terselenggaranya birokrasi yang efektif, bersih, dan berwibawa.
 - c. Terbangunnya system pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap tuntutan masyarakat.
 - d. Terciptanya aparatur pemerintahan yang professional, disiplin dan memiliki etos kerja, bertanggung jawab dan memiliki integritas untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan bebas dari KKN.
 - e. Tersedianya prasarana dan sarana penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan pemerintahan yang memadai sesuai perkembangan teknologi.
 - f. Peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah untuk mendukung kinerja pelaksanaan tanggung jawab.
 - g. Peran serta DPRD menjadi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, serta pengawasan pembangunan dan penegakan hukum oleh Lembaga yudikatif.
 - h. Kemitraan yang konstruktif antara pemerintahan daerah, masyarakat, dan swasta dalam pembangunan daerah.
 - i. Penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan pelayanan masyarakat yang prima terutama dikawasan pedesaan.

BAB III

VISI-MISI

A. VISI PEMBANGUNAN

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah: Indonesia Yang Mandiri Maju, Adil dan Makmur. Sedangkan Visi Pembangunan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau adalah : Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat yang agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2020.

Sedangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yang hendak diwujudkan adalah : Kaupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarkat Agamis Tahun 2020.

Untuk menyesuaikan periode RPJ Daerah Kabupaten Kampar dengan Visi Daerah sampai dengan tahun 2025, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kampar diatas sampai tahun 2025, dengan demikiasn rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Kampar adalah : Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.

Makna yang terkandung dalam visi diatas adalah:

1. Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pada pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam bermasyarakat Kabupaten Kampar.
2. Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadi dirinya pesaing yang Tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlakukan secara adil.
3. Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang Agamis, dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilindungi nilai-nilai keagamaan, sesuai dengan motto masyarakat Kampar untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Serambi Mekkah Provinsi Riau.

B. MISI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka misi pembangunan yang harus dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global. Misi ini bermaksud:
 - a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis ke dalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
 - b. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotongroyong (batobo) serta usaha-usaha antisipatif menghadapi pengaruh global.
 - c. Memasyarakatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat. Misi ini bermaksud:
 - a. Membangu e-government berbasis good governance yang Amanah dan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat Kampar.
 - b. Mengembangkan system manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelolakekayaan yang dimiliki daerah, baik sumber daya alam, teknologi, budaya, dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien dan efektif dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kepastian hukum.

Untuk mewujudkan maksud diatas perlu didukung oleh kemampuan individu apparatus pemerintah yang mempunyai motivasi, kepercayaan diri, jujur dan inovasi melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan, misi ini bermaksud:

- a. Sehat jasmani dan rohani yang memiliki mentalitas dan kemampuan dalam mengembnangkan diri, dan berperan dalam membangun daerahnya.
 - b. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - c. Dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tuntutan pembangunan daerah.
 - d. Taat melaksanakan dan mengamalkan syariat (ajaran dan aturan) agama dan menjadikannya landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat untuk terciptanya kedamaian hidup umat beragama antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal denganorientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional. Misi ini bermaksud:
- a. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat berskala kecil dan menengah yang berorientasi pasr dan industry pengelolaan hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah.
 - b. Memperkuat Lembaga dan organisasi masyarakat yang berorientasi pasar yang dikembangkan agar tercipta kemampuan bersaing danbermitra dengan pesaing pasar lainnya untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
 - c. Mengembangkan system danjaringan data dan informasi serta promosi potensi unggulan daerah.
 - d. Mendorong pertumbuhan investasi melalui pola kemitraan yang sejajar dan porposional antara swasta, masyarakat dan pemerintah dalam bentuk Kerjasama yang harmonissling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memcu laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya.
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan. Misi ini bermaksud:
- a. Melakukan penataan ruang atau Kawasan sesuai dengan peruntukannya asecara serasi, harmonis, dan seimbang diselaraskan dengan daya dukung lingkungannya.
 - b. Penataan ruang atau Kawasan dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan daerah harusselalu dalam kendali pemerintah agar keserasian, keharmonisan, keterpaduan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dapat terjaga dan terpelihara sehingga tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka oanjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan “Kabupaten Kmpar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”. Sebagai landasan bagin tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat

adil dan Makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya “Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”, pembangunan Kabupaten Kampar dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global, dengan tujuan:
 - a. Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis dalam beretika ditengah bermasyarakat dalam segala aspek kehidupan, sehingga menjadi ciri khas daerah.
 - b. Terwujudnya nilai-nilai gotong royong (batobo) dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah, sehingga menjadi roh dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Terciptanya toleransi, Kerjasama, dan saling pengertian antar multikultur sehingga menjadi sinergi yang serasi untuk mendukung pembangunan.
 - d. Terwujudnya nilai-nilai ,musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat dan pemerintah.
2. Mewujudkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat, dengan tujuan:
 - a. Terbangunnya tat Kelola pemerintah yang bersih, baik dan berwibawa (good governance and clean government) sesuai dengan Struktur Organisasi Tatalaksana Kerja (SOTK) yang berlaku.
 - b. Terbentuknya aparatur yang berkemampuan tinggi, professional. Dan memiliki integritas.
 - c. Terciptanya akses yang tinggi bagi public untuk memperoleh pelayanan umum dari Lembaga dan aparat pemerintah.
 - d. Terciptanya kualitas pelayanan publik yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat.
 - e. Terselenggaranya pemantau dan evaluasi kinerja kebijakan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - f. Terciptanya supermasi hukum bagi seluruh aparat pemerintah secara adil dan terbuka.
 - g. Terbangunnya Kerjasama antara pihak eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.
 - h. Terciptanya ketertiban masyarakat secara aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan.
3. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustry, tenaga kerja dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional, dengan tujuan:
 - a. Terbangunnya pusat – pusat pertumbuhan utama, tempat berinteraksinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pulau Sumatera, dan negara – negara di wilayah asia.
 - b. Terciptanya kualitas pelayanan sarana dan jasa perekonomian yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional.

- c. Terciptanya usaha ekonomi berbasis masyarakat berskala kecil dan menengah untuk manampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja.
 - d. Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah melalui kemitraan pemerintah dengan swasta.
 - e. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan minimal 7% pertahun hingga tahun 2025 dengan pendapatan per kapita menuju target nasional sebesar US \$ 6.000 pada tahun 2025.
 - f. Terbangunnya agrobisnis dan agroindustry sebagai hilir kegiatan pertanian dan perkebunan yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi daerah.
 - g. Terjaganya tingkat produksi dan kontribusi sector pertambangan migas dan secara bertahap peran pengelolaannya menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah kabupaten Kampar.
 - h. Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala kecil dan menengah di sector primer, terutama di kawasan pedesaan.
 - i. Terbangunnya lembaga jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang tangguh pada setiap sentra kegiatan ekonomi masyarakat dan pemasaran di Kabupaten Kampar, melalui penguatan struktur lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah sehingga mampu berfungsi sebagai lembaga intermediasi serta dapat menjadi Agent of Development di Kabupaten Kampar.
4. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan, dengan tujuan:
- a. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah.
 - b. Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah.
 - c. Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan yang sesuai dengan skala pelayanan pusat yang bersangkutan.
 - d. Tersedianya infrastruktur wilayah mencakup jaringan jalan yang membentuk struktur ruang wilayah.
 - e. Terciptanya sentra – sentra dan cluster produksi di setiap bagian wilayah sesuai dengan komoditi unggulannya.
 - f. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan dan Agropolitan yang berfungsi mendorong proses pertambahan nilai produk lokal melalui kegiatan pengolahan dan perdagangan.
 - g. Terbangunnya sarana penghubung yang berfungsi sebagai feeder antara sentra – sentra produksi dan pusat – pusat pedesaan dengan jaringan transportasi utama.
 - h. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup di wilayah yang menjadi sentra produksi dan pusat kegiatan.
 - i. Terciptanya kualitas lingkungan yang baik bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sesuai dengan standar kualitas lingkungan yang berlaku.
 - j. Penurunan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, genangan, kebakaran hutan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya.
 - k. Tersedianya secara kuantitas dan kualitas aparat pengendali dan pengawasan lingkungan dalam pelaksanaan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
 - i. Keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap kerusakan dan penurunan kualitasnya.
 - m. Terlaksananya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

- n. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kawasan yang berfungsi lindung melalui pengawetan kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan ekowisata.
 - o. Tercapainya kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dibidang lingkungan hidup sesuai dengan standar berlaku.
5. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan ke depan, dan taat pada aturan dan norma yang berlaku dengan dukungan sistem pendidikan untuk menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara, dengan tujuan sebagai berikut:
- a. Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan status kesehatan antara lain : meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan meningkatnya status gizi balita.
 - b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan oleh peningkatan ipm hingga batas minimal status IPM sebesar 80 pada tahun 2025.
 - c. Terciptanya kehidupan yang agamiis dan toleransi kerukunan antar umat beragama.
 - d. Terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai – nilai agama, keimanan, dan ketaqwaan.
 - e. Terselenggaranya syariat agama yang menjadi kewajiban bagi setiap pemeluknya.
 - f. Terwujudnya nilai – nilai positif dikalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat.
 - g. Terwujudnya partisipasi dan tanggungjawab masyarakat yang tinggi terhadap kerukunan kehidupan beragama, keamanan dan keterlibatan yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
 - h. Tersedianya prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat kabupaten Kampar dan terwujudnya Kampar sebagai pusat pendidikan dalam jangka menengah sudah mempunyai universitas.
 - i. Peningkatan kualitas social ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar yang ditandainya dengan penurunan kelompok masyarakat miskin hingga 5% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Kampar, peningkatan TPAK hingga 90; penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setengah menganggur; dan peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja di sector ekonomi formal dan informal.
 - j. Peningkatan produktifitas melalui pelatih, peningkatan keterampilan, dan mutu manajemen yang sesuai dengan standar yang diakui secara internasional.
 - k. Tersedianya infrastruktur sosial, politik, dan budaya yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kampar melalui dukungan sarana elektronik dan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
 - l. Terwujudnya pemahaman bersama diantara simpul – simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit social.
 - m. Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, social, politik, dan kebudayaan.
 - n. Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten dengan partisipasi masyarakat secara aktif.
 - o. Terwujudnya sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, serdas, dan memiliki budaya politik yang sehat dan santun.

- p. Terwujudnya kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan heterogenitas yang tinggi melalui harmonisasi, saling menghormati, dan terbangunnya toleransi.

Untuk mencapai tujuan pokok diatas, maka ditetapkan kebijakan umum Kabupaten Kampar tahun 2005-2025 sebagai berikut :

- a. Membangun kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebudayaan Kampar dan berlandaskan nilai – nilai keagamaan.
- b. Mengubah paradigm kepemimpinan pemerintahan dari pendekatan struktural dan formal menjadi pendekatan peran dan keteladanan yang bersifat praktis.
- c. Melaksanakan tanggungjawab pelayanan umum oleh aparatur pemerintahan berbasis kompetensi dan profesionalitas melalui pembinaan aparatur secara adil dan proposional.
- d. Memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintahan guna mengoptimalkan kinerja dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menyiapkan kebijakan guna mendukung terwujudnya visi pembangunan kabupaten Kampar, dengan acuan diskriminatif positif yang dimanifestasikan secara implisit maupun eksplisit.
- f. Membangun prospektif transformasi perekonomian melalui diversifikasi sector non-migasi yang prospektif untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- g. Mengubah paradigm pembangunan kependudukan dari pendekatan sectoral menjadi pendekatan terintegrasi.
- h. Melakukan pembinaan bidang kependudukan secara proporsional dan terintegrasi, termasuk dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban melalui mekanisme pengendalian penduduk.
- i. Menyiapkan kebijakan distribusi penduduk sebagai bagian terpandu dan distribusi lahan dan aset pembangunan dengan merujuk kepada perkembangan global.

1. Strategi

Strategi utama dalam mendukung pencapaian tujuan pokok pembangunan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
 - 1) Pengendalian, dan pengembangan benda-benda sejarah, permuseuman dan kepurbakalaan, melestarikan nilai-nilai seni budaya tradisional yang islami, menjadi nilai-nilai seni budaya tradisi yang islami.
 - 2) Mengembangkan nilai budaya lokal khususnya budaya Kampar untuk memperkuat dan memperkaya khasanah budaya daerah dan budaya nasional, serta menangkal penetrasi budaya asing yang negative melalui revitalisasi dan peningkatan upaya mengapresiasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
 - 3) Menghargai terciptanya asimilasi kultural serta semangat heterogenitas dan pluralitas sebagai daya dukung pembentukan karakter bangsa.
 - 4) Memasyarakatkan budaya Kampar melalui pendidikan di sekolah; publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik; penyelenggaraan acara seni dan budaya; dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan.

- 5) Memasyarakatkan nilai-nilai mulia budaya Kampar dan menjadikan budaya Kampar sebagai ruh motivasi dalam melaksanakan pembangunan.
- b. Mewujudkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah yang bersih, transparan, berkeadilan, dan demokratis merupakan tuntutan yang kuat dalam rangka terselenggaranya desentralisasi dan otonomi daerah. Asas profesionalisme dalam pelayanan publik dilaksanakan melalui perkuatan kapasitas dan kompetensi kelembagaan dan aparatur pemerintahan serta membangun paradigma sebagai reorientasi baru, yaitu dari pemerintah untuk masyarakat. Strategi pembangunan pemerintah daerah meliputi :

- 1) Melaksanakan tatakelola pemerintahan berlandaskan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku melalui pemantapan struktur kelembagaan sesuai dengan fungsi-fungsi yang diamanatkan kebijakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas; penyediaan prasarana dan sarana fisik dan social; serta peningkatan kinerja pelayanan untuk menunjang produktifitas masyarakat.
- 2) Merencanakan dan melaksanakan program dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimum, terutama dalam hal perijinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum, dan pelayanan kepentingan masyarakat akan hak-hak sipilnya.
- 4) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah bagi pembangunan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta.
- 5) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas kompetensi, dan profesionalisme, termasuk pemantapan sistem pengangkatan, penempatan, pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemberian penghargaan dan sanksi, dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang secara proporsional.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, penegakan hukum dan kehidupan politik secara demokratis.
- 7) Memperkuat kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga legislatif dan yudikatif dalam rangka perencanaan, pembangunan; pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik; dan penegakan hukum.
- 8) Menjamin kebebasan media sebagai sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah; sarana penyebaran informasi dalam rangka pencerdasan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta sarana pembangunan nilai-nilai demokrasi.
- 9) Mewujudkan regulasi dan sarana informasi tahapan pembangunan yang mudah diakses, sehingga publik mengetahui tahapan pencapaian pembangunan sebagai perwujudan transparansi melalui e-government.
- 10) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (good governance and clean government) sesuai dengan SOTK yang berlaku.

- 11) Mewujudkan aparatur yang berkemampuan tinggi dan memiliki integritas untuk menghindarkan terjadinya KKN.
 - 12) Menyediakan akses yang tinggi bagi publik untuk memperoleh pelayanan umum dari lembaga dan aparat pemerintah.
 - 13) Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat.
 - 14) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kinerja kebijakan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 15) Mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh aparat pemerintah secara adil dan terbuka.
- C. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pedesaan pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, tenaga kerja dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
- 1) Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata.
 - 2) Menerapkan standar mutu nasional dan internasional dalam kegiatan perekonomian.
 - 3) Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penerapan standarisasi mutu produk dan pelayanan jasa perekonomian.
 - 4) Membina kegiatan usaha berskala kecil dan menengah agar mutu produk dan jasa pelayanan untuk menjangkau persyaratan standar nasional dan internasional.
 - 5) Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara Pemerintah Daerah, Swasta, UKM, Koperasi dan Perbankan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan.
 - 6) Memperkuat struktur lembaga keuangan milik pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga mampu berfungsi sebagai lembaga intermediasi serta dapat menjadi agent of development di Kabupaten Kampar.
 - 7) Menggali dan mengembangkan potensi daerah guna menunjang perekonomian daerah perlu ditumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - 8) Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan lingkungan guna penyesuaian terhadap entry barrier pasar dunia.

- 9) Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang lebih adil.
- 10) Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan melalui penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit dan penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu serta meningkatkan pra dan pasca panen.
- 11) Meningkatkan produksi perkebunan melalui pola pengelolaan yang diterapkan dengan kinerja positif, sekaligus untuk pemulihan lahan-lahan kritis.
- 12) Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, dan bahan energi (biofuel) serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan potensi pasar regional melalui diversifikasi, produktifitas dan mutu produk dalam rangka pertambahan nilai dan perluasan lapangan kerja.
- 13) Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit unggul dan peningkatan mutu produk serta mengembangkan industri pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan ketersediaan produk dalam jangka panjang.
- 14) Meningkatkan usaha agrobisnis peternakan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal bidang peternakan guna tersedianya produk ternak secara kontinyu baik kuantitas maupun kualitas.
- 15) Meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan yang bersifat subsisten secara lebih profesional dan terintegrasi dengan kegiatan off-farm serta kegiatan bisnis lainnya.
- 16) Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.
- 17) Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan kebijakan, regulasi dan perizinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum, dan kepastian hukum.
- 18) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator pembangunan ekonomi melalui penghapusan ekonomi biaya tinggi; penciptaan akses terhadap permodalan dan pasar; dan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi.
- 19) Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi potensi sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan daerah dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi, seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi.

- d. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.
- 1) Mendorong terbentuknya struktur ruang yang lebih menjamin pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Kampar melalui pengembangan pusat -pusat kegiatan termasuk agropolitan yang berfungsi mengolah komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui kegiatan agroindustri dan agrobisnis serta pusat perikanan.
 - 2) Meningkatkan pelayanan prasarana mendukung perkembangan pusat sub-wilayah, dan agropolitan di wilayah perdesaan yang sesuai dengan standar penyediaan prasarana dan sarana.
 - 3) Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan, pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar.
 - 4) Mengalokasikan ruang bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan berskala kecil dan menengah pada kawasan pedesaan dan relatif tertinggal yang ditujukan sebagai kegiatan rakyat dan masyarakat tempatan.
 - 5) Membangun Prasarana kelistrikan, keenergian, telekomunikasi, dan sarana sosial lainnya di pusat-pusat kecamatan dan sentra ekonomi.
 - 6) Memperkuat fungsi RTRW Kabupaten Kampar dan rencana yang lebih rinci sebagai acuan pemanfaatan ruang serta membangun sistem pengendalian alih fungsi ruang yang ditetapkan. Implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas kawasan budidaya dan pelestariannya.
 - 7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur pelaksanaannya melalui perkuatan institusi koordinasi penataan ruang daerah; regulasi perizinan dan penertiban; memperkuat institusi pengawasan; dan pembinaan aparatur, termasuk PPNS dan pejabat pengawas lingkungan.
 - 8) Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan infrastruktur wilayah berskala besar.
 - 9) Mengendalikan kerusakan lingkungan yang terwujud sebagai bencana banjir yang terjadi secara berkala, melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu untuk memulihkan fungsinya sebagai penampung air hujan, peresapan air, penyimpan air, dan pengaliran air.
 - 10) Mengendalikan pencemaran dan sedimentasi pada badan air oleh kegiatan domestik, pertanian, perkebunan, industri dan kehutanan.
 - 11) Mencegah terjadinya kebakaran hutan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar dan wilayah sekitarnya dan mengganggu hubungan diplomatik dengan negara tetangga.
 - 12) Mengembangkan kemampuan penyelenggaraan inisiasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologis Kabupaten Kampar.

- 13) Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai alternatif sumber-sumber perekonomian. Pemanfaatan sumber daya alam migas di Kabupaten Kampar sebagai sumber pendanaan perekonomian perlu dilengkapi dengan pengembangan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan guna mer unjang kesinambungan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
 - 14) Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengelolaan lingkungan, peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan diwujudkan dalam penetapan standar kualitas: meningkatkan kualitas pengawasan kerusakan dan penegakan hukum bagi pelanggaran; dan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; pencemaran lingkungan; melestarikan dan lingkungan.
- e. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan ke depan, dan taat pada aturan dan norma yang berlaku dengan dukungan sistem pendidikan untuk menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
- 1) Menyediakan prasarana, sarana, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kebutuhan kesehatan.
 - 2) Memasyarakatkan budaya hidup sehat melalui pendidikan kesehatan di sekolah; keluarga berencana mengatur usia perkawinan dan jarak kelahiran; kesehatan reproduksi; Meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak usia dibawah lima tahun; Melaksanakan kesehatan keluarga melalui senam sehat, makanan sehat dan menu sehat; Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan tata cara pengolahari sampah.
 - 3) Memajukan dan memotivasi program pembinaan kesehatan yang terkait langsung dengan kesehatan reproduksi bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
 - 4) Memajukan pendidikan agama di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam pengetahuan agama serta membentuk sikap dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntutan agama.
 - 5) Memajukan dan memotivasi program pembinaan keagamaan pada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata.
 - 6) Menerapkan nilai-nilai agama kedalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang berakhlak luhur, memiliki integritas, jujur, dan menghindari KKN.
 - 7) Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan kepada masyarakat.

- 8) Menyediakan prasarana dan sarana pendidikan dasar, menengah, kejuruan, pendidikan tinggi, dan luar sekolah sesuai dengan standar kebutuhan pendidikan, termasuk tenaga pengajar dan kurikulum pendidikan.
- 9) Menciptakan jejaring pendidikan pengembangan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pembedaan keilmuan yang terkait dengan karakteristik global pendidikan masa depan sebagai kelanjutan wajib belajar sembilan tahun.
- 10) Memajukan pendidikan dengan memasukkan unsur-unsur demografis dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler berkenaan masalah kependudukan, fertilitas, mortalitas, dan migrasi
- 11) Mempercepat pengadaan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pengiriman putra-putri Kampar yang potensial ke Perguruan Tinggi bertaraf dan berkualitas internasional ke negara maju.
- 11) Mempercepat pengadaan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pengiriman putra-putri Kampar yang potensial ke Perguruan Tinggi bertaraf dan berkualitas internasional ke negara maju.
- 12) Mengubah pendekatan perencanaan pendidikan menengah dan tinggi dari pendekatan demokratis ke pendekatan sistem yang dipadu dengan pendekatan ketenagakerjaan dengan unsur-unsur pengendalian pertumbuhan penduduk dan penciptaan lapangan kerja sehingga terciptanya keseimbangan antara lulusan sekolah dengan lapangan kerja yang tersedia.
- 13) Melaksanakan pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk agar mampu mendukung kehidupan bermasyarakat yang berbudaya.
- 14) Membangun kerjasama antar daerah, dalam perumusan kebijakan redistribusi penduduk melalui transmigrasi lokal dan migrasi masuk ke Kabupaten Kampar.
- 15) Melibatkan masyarakat dalam keamanan lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban umum melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi kornasyarakat.
- 16) Mengupayakan kesepahaman bersama diantara simpul-simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial.
- 17) Melaksanakan tanggungjawab aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan.
- 18) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan bagi pemeliharaan dan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
- 19) Menyiapkan sistem tanggap darurat jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
- 20) Mendorong kerukunan umat berdampingan antara masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati dan toleransi

- 21) Mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas, memiliki budaya politik yang sehat dan santun.
- 22) Menghargai terciptanya asimilasi kultural, semangat heterogenitas dan pluralitas yang memiliki daya dukung terhadap pembentukan karakter bangsa (nation building).
- 23) Melaksanakan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) serta kehidupan demokratis guna terwujudnya masyarakat yang mandiri.
- 24) Menciptakan demokrasi, meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan guna mewujudkan transparansi publik.
- 25) Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat partisipasi masyarakat; dan meningkatkan kualitas pelaksanaan aspirasi masyarakat.
- 26) Menjamin kebebasan dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.
- 27) Mewujudkan supermasi; hukum di lingkungan masyarakat.

2. Peran Sub-Wilayah Pembangunan

Dalam jangka panjang, perwilayahan pembangunan Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui pembentukan sistem pusat-pusat yang mengerakkan pembangunan wilayah yang dilayaninya, didukung oleh sistem prasarana wilayah. Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Riau, Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berperan sebagai pendukung kepentingan penguatan internalisasi pengembangan wilayah di Provinsi Riau.

Guna mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke desa, maka peran PKL dan sub pusat kegiatan menjadi penting. Kawasan perdesaan menjadi satuan ruang pembangunan yang diprioritaskan yang dapat dicapai melalui strategi pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang memberikan penambahan nilai pada skala lokal, antara lain melalui kegiatan agroindustri dan agrobisnis; pengembangan pusat-pusat kegiatan berskala lokal sebagai agropolitan; pembangunan prasarana wilayah perdesaan sebagai feeder terhadap sistem prasarana wilayah provinsi dan kabupaten/kota; penyediaan sarana umum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia; penguatan aparaturnya penyelenggara pembangunan di kawasan perdesaan guna meningkatkan pelayanan masyarakat; pembinaan dan pendidikan politik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis; dan mengembangkan budaya adat yang bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah serta membuka peluang bagi peranserta masyarakat perdesaan secara aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pada jangka panjang dibutuhkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan lebih seimbang dan proporsional antara sub wilayah Kampar bagian Utara dan Selatan dengan Kampar bagian Tengah dengan tetap memperhatikan fungsi-fungsi kawasan di masing-masing sub wilayah tersebut. Dalam struktur keruangan, terwakili oleh keberadaan kota Bangkinang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan ibukota kecamatan sebagai sub PKL yang didukung oleh prasarana transportasi lokal. Ibukota kecamatan sebagai sub-sub PKL dapat berperan sebagai pusat-pusat kegiatan dengan fungsi pemerintahan, industri, perdagangan atau jasa. Sedangkan perdesaan berfungsi sebagai pusat pengolahan produk-produk setempat dalam

rangka penambahan nilai dan pendistribusian barang; dan jasa didukung oleh prasarana transportasi berupa jalan lokal dan angkutan sungai. Pengembangan pusat-pusat kegiatan lokal dan sub lokal tersebut dapat berfungsi sebagai agropolitan yang mewadahi kegiatan agroindustri yang mengolah produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kekayaan alam lainnya serta kegiatan agrobisnis yang mendistribusikan dan memasarkan produk pengolahan tersebut.

Untuk mendukung Pekanbaru, Dumai, Siak dan Kuala Enok sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) harus ditunjang oleh sistem transportasi jalan arteri primer, jalan kereta api (Rail way) dimana Bangkinang sebagai PKL dilalui oleh arteri primer (jalan nasional), dalam jangka panjang sebagai antisipasi padatnya arus lalu lintas dan rawan longsor pada ruas arteri primer dimaksud dibutuhkan jalan alternatif Sumatera Barat - Riau yaitu ruas jalan Payakumbuh - Tanjung Permai - Kebun Tinggi - Batu Sasak - Lubuk Agung - Lipat Kain lebih kurang 75Km, Ruas jalan ini akan memperpendek jarak tempuh dari Taluk Kuantan - Kampar Wilayah Tengah dan Selatan ke Sumatera Barat. Disamping itu jalan alternatif lain adalah pada ruas Lipat kain - Lubuk Agung - Balung - Tanjung Belit (Sumatera Barat).

Kawasan perbatasan Barat dengan pusat pengembangan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dikembangkan sebagai pusat pariwisata, industri dan jasa, disamping dipertahankan fungsinya sebagai konservasi dan diusulkan sebagai kawasan strategis Nasional/Provinsi Riau. Kawasan Perbatasan Timur dan sebahagian kawasan Kampar bahagian Utara (Kecamatan Tapung dan Tapung Hilir), dengan pusat pengembangan Kecamatan Tambang dan Siak Hulu dikembangkan sebagai pusat Agropolitan, Agroindustri, Agrobisnis, Perumahan dan jasa.

3. Tahapan dan Skala

Bertitik tolak dari visi Kabupaten Kampar dalam mewujudkan negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025, maka untuk mencapai visi tersebut Pembangunan Jangka Panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan menjadi berbeda-beda, namun tahapan tersebut berkesinambungan dari tahap ketahap berikutnya untuk mewujudkan sararan pokok pembangunan jangka panjang. Atas dasar tersebut tahapan dan skala prioritas pertama disusun sebagai berikut:

a. RPJMD Ke-1 (2005-2009)

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, maka RPJMD Ke-1 (2005-2009) diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat berbudaya dan agamis dalam rangka meningkatkan pemahaman budaya yang berfalsafah "adat bersendikan syara'; syara' bersendikan kitabullah", dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan peningkatan pembangunan dan pengembangan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis dan agroindustri.

Kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan yang ditanda dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan antara lain meningkatnya wawasan pemahaman masyarakat terhadap falsafah adat bersendikan syarat syarat bersendikan kitabullah, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya status kesehatan masyarakat, meningkatnya pendapatan

perkapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Penekanan pada tahap kesatu ini terutama ditujukan memberikan nilai tambah terhadap usaha-usaha masyarakat terutama dalam bidang pertanian dalam arti luas melalui agrobisnis dan agroindustri serta agropolitan. Arah kebijakan yang diperlukan dalam jangka menengah dilakukan dengan menyusun master plan pengembangan pertanian menuju satu kawasan dengan satu produk unggulan (one village and one product), sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan masing-masing wilayah atau kawasan yang berwawasan lingkungan.

Disamping itu diperlukan pula dukungan infrastruktur yang memadai untuk terciptanya aksesibilitas pada kantong produksi dan pasar, dengan tujuan utama pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Kampar yang sebahagian besar berusaha di bidang pertanian.

b. RPJMD Ke-2 (2010-2014)

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap pertama, maka RPJMD Ke-2 (2010- 2014) ditujukan peningkatan sumber daya manusia yang sehat, beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, peningkatannya sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah yang berpenghasilan menengah serta merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Penekanan utama pada tahap ini adalah peningkatan sumberdaya manusia melalui relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pengelolaan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak, terciptanya kondisi penduduk yang tumbuh dan seimbang dalam rangka terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. RPJMD Ke-3 (2015-2019)

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap kedua maka RPJMD Ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan penekanan pada pencapaian daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang berbasis kepada keunggulan kompetitif dan komperatif dengan dilandasi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daya saing perekonomian Kabupaten Kampar yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya agroindustri dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhi ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktifitas, penguasaan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

d. RPJMD Ke-4 (2020-2024)

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap ketiga maka RPJMD Ke-4 (2020 - 2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaya dan

agamis melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang dilandasi keunggulan komperatif perekonomian daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan tingkat kemajuan daerah yang telah dicapai dalam tahapan pembangunan jangka menengah sebagaimana tersebut di atas, diharapkan sumberdaya manusia Kabupaten Kampar berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berahlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak, perilaku dan budaya masyarakat kampar yang beragama, beriman, bertaqwa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, ainamis dan berorientasi Iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh untuk terwujudnya Kabupaten Kampar yang berdaya dengan indikator kemampuan daya saing perekonomian daerah yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan agroindustri dan sumberdaya alam serta sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi di Kabupaten Kampar.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Kampar sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dan berjalannya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk menetapkannya. Selain itu keberhasilan pembangunan juga diikuti dengan kesepakatan pembangunan semua stakeholder yang ada dalam jajaran pemerintahan dan organisasi masyarakat melalui koordinasi dan komunikasi pembangunan, sehingga menjadi kesatuan gerak langkah yang menyatu dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan akan tercapai bilamana ada dukungan atas akurasi data, dan pelaksanaan pembangunan itu harus fokus sesuai komitmen seluruh masyarakat yang menyepakati visi dan misi pembangunan yang hendak dicapai serta terintegrasinya kegiatan pembangunan, sinergi pembangunan yang saling mendukung satu sama lainnya dan koordinasi pembangunan untuk menyatukan serta menyamakan persepsi, secara kontinyu dan konsisten sesuai pentanapan pembangunan.